

ABSTRAK

Muhammad Bagas Ramadhan, 126102202143, *Syibhul 'Iddah* Perspektif *Feminist Legal Theory* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah*), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag.

Kata kunci: *Syibhul'Iddah*, *Feminist Legal Theory*, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dalam masa *'iddah*. Selama ini perempuan harus menjalani masa *'iddah* setelah terjadinya perceraian sedangkan laki-laki tidak memiliki ketentuan untuk menjalankan *'iddah* yang menimbulkan ketidakadilan karena dampak hukum yang terjadi, sehingga laki-laki bebas melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain tanpa menjalani masa *'iddah* yang wajib dilakukan oleh perempuan. di sisi lain, suami yang telah menceraikan istrinya dapat melakukan pernikahan kembali dengan perempuan lain dan merujuk kembali mantan istrinya di masa *'iddah*. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan terjadinya poligami terselubung yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. seiring berjalannya waktu telah diberlakukannya *syibhul 'iddah* laki-laki yang ketentuannya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan dalam masa *'iddah*. Maka dari itu penulis menganalisis hal tersebut dengan menggunakan tinjauan *Feminist Legal Theory*.

Fokus penelitian ini tentang *syibhul 'iddah* yang tertuang didalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/ HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* dengan pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana ketentuan *syibhul 'iddah* yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* ?, 2) Bagaimana ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* perspektif *Feminist Legal Theory*?

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana penelitian dilaksanakan dengan menggunakan data literatur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentatif, menelaah, serta pengkajian data atau dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengecekan keabsahan data diperoleh melalui triangulasi dan kredibilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan *syibhul 'iddah* yang terkandung didalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* yakni

bermaksud sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi seorang laki-laki bekas suami yang akan menikah lagi dengan wanita lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya. Selain itu bertujuan untuk memberikan kepastian dalam tata cara dan prosedur terkait pencatatan pernikahan tersebut. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam surat edaran tersebut maka, laki-laki yang ingin mencatatkan pernikahan dapat terlaksana apabila telah resmi bercerai. Hal ini perlu dibuktikan dengan adanya akta cerai. Kemudian laki-laki dapat menikah lagi dengan wanita lain apabila telah habis masa *'iddah* istrinya, serta laki-laki yang telah menikah lagi dan ingin merujuk kembali istrinya hanya bisa dilakukan apabila mendapat izin poligami dari Pengadilan. Jadi konsep daripada *syibhul 'iddah* merupakan sesuatu hal yang menyerupai *'iddah*. Dengan demikian seorang lelaki harus melaksanakan *syibhul 'iddah* akibat dari putusnya pernikahan seperti yang dilakukan oleh wanita untuk masa tungguanya (*'iddah*). 2) Ketentuan *syibhul 'iddah* yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* perspektif *Feminist Legal Theory*, feminisme yang berdasarkan kesetaraan dan keadilan terutama bagi kaum perempuan bahwa ketentuan yang terdapat didalam surat edaran tersebut yakni sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan dapat digunakan laki-laki sebagai upaya untuk berfikir ulang ketika ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Selain itu mencegah potensi terjadinya poligami terselubung yang dilakukan oleh laki-laki yang mengakibatkan dapat merugikan bagi perempuan. Jadi dengan berlakunya *syibhul 'iddah* yang tertuang didalam surat edaran tersebut telah mewujudkan dan menciptakan kesetaraan serta keadilan diantara laki-laki dan perempuan yang sama-sama diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*.

ABSTRACT

Muhammad Bagas Ramadhan, 126102202143, Male Syibhul 'Iddah Perspective of Feminist Legal Theory (Study of Circular Letter of Director General of Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Regarding Marriage in the 'Iddah Period), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag.

Keywords: Syibhul'Iddah, Feminist Legal Theory, Circular Letter of Director General of Islamic Guidance.

This research is motivated by the emergence of Circular Letter of the Director General of Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 which regulates the registration of marriages during the 'iddah period. So far, women have to undergo an 'iddah period after a divorce while men do not have provisions to carry out 'iddah which creates injustice because of the legal impact that occurs, so that men are free to remarry other women without undergoing the 'iddah period that women are obliged to do. on the other hand, a husband who has divorced his wife can remarry another woman and refer back to his ex-wife during the 'iddah period. With this, it results in covert polygamy which creates injustice for women. Over time, the syibhul 'iddah of men has been enacted, the provisions of which are regulated in the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance regarding marriage during the 'iddah period. Therefore, the author analyzes this matter using the Feminist Legal Theory review.

The focus of this research is on syibhul 'iddah which is contained in the provisions of Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage in the 'Iddah Period with the following questions: 1) How is the provision of Syibhul 'Iddah regulated in Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage in the 'Iddah Period?, 2) How is the provision of Shibhul 'Iddah in Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage in the 'Iddah Period from the perspective of Feminist Legal Theory?

This research uses a type of library research method in which research is carried out using literature data. Data collection techniques in this study used documentative techniques, reviewing, and reviewing data or documents. While the data analysis technique used in this research is descriptive analytical. Data validity checking is obtained through triangulation and credibility.

The results of this study indicate that: 1) The provisions of syibhul 'iddah contained in Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 concerning marriage during the 'iddah period are intended as instructions in the implementation of marriage registration for a male

ex-husband who will remarry another woman during the 'iddah period of his ex-wife. In addition, it aims to provide certainty in the procedures and procedures related to the registration of these marriages. With the provisions contained in the Circular, a man who wants to register a marriage can do so if he has been officially divorced. This needs to be proven by a divorce certificate. Then a man can remarry another woman if his wife's 'iddah period has expired, and a man who has remarried and wants to refer his wife back can only do so if he gets a polygamy permit from the Court. So the concept of shibhul 'iddah is something that resembles 'iddah. Therefore, a man must observe the syibhul 'iddah as a result of the breakup of the marriage just as a woman does for her waiting period ('iddah). 2) The provisions of syibhul 'iddah regulated in the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance on Marriage in the 'iddah Period from the perspective of Feminist Legal Theory, feminism based on equality and justice, especially for women that the provisions contained in the Circular Letter are a form of protection for women and can be used by men as an effort to rethink when they want to remarry another woman. In addition, it prevents the potential for covert polygamy committed by men, which can be detrimental to women. So with the enactment of syibhul 'iddah contained in the Circular has realized and created equality and justice between men and women who are equally obliged to run 'iddah.

التجريد

محمد باغاس رمضان، 126102202143، ذكر سببويه العدة من منظور النظرية القانونية النسوية (دراسة رسالة تعميم المدير العام لبيماس إسلام رقم-P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 بشأن الزواج في فترة العدة)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونغاونغ، 2024، المشرف: د. ح. أحمد مهدي أنشور، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: سببويه العدة، النظرية القانونية النسوية، تعميم المدير العام للإرشاد الإسلامي.

الدافع وراء هذا البحث هو ظهور الرسالة التعميمية للمدير العام لبيماس إسلام رقم P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 التي تنظم تسجيل الزواج خلال فترة العدة. حتى الآن، يتعين على المرأة أن تخضع لفترة العدة بعد الطلاق، بينما لا توجد أحكام خاصة بالرجال للقيام بالعدة مما يخلق ظلماً بسبب الأثر القانوني الذي يحدث، بحيث يكون الرجل حراً في الزواج من امرأة أخرى دون الخضوع لفترة العدة التي تلزم بها المرأة، ومن ناحية أخرى، يمكن للزوج الذي طلق زوجته أن يتزوج امرأة أخرى ويراجع زوجته السابقة خلال فترة العدة. وبهذا يترتب على ذلك تعدد الزوجات في الخفاء مما يوقع الظلم على المرأة، وبمرور الوقت تم تشريع العدة للرجال والتي تم تنظيم أحكامها في تعميم مدير عام الإرشاد الإسلامي بشأن الزواج خلال فترة العدة. ولذلك، تقوم المؤلفة بتحليل هذه المسألة باستخدام مراجعة النظرية القانونية النسوية.

محور هذا البحث هو ذكر شبهة العدة كما جاء في أحكام تعميم مدير عام الإرشاد الإسلامي رقم P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 بشأن الزواج في فترة العدة، وذلك من خلال الأسئلة التالية (1) كيف يتم تنظيم حكم سببويه العدة للرجال في تعميم مدير عام الإرشاد الإسلامي رقم P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 بشأن الزواج في فترة العدة، (2) كيف يتم تناول حكم سببويه العدة للذكور في تعميم المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم-P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 بشأن الزواج في فترة العدة من منظور النظرية القانونية النسوية؟

يستخدم هذا البحث نوعاً من أساليب البحث المكتبي الذي يتم فيه إجراء البحث باستخدام بيانات الأدبيات. ويستخدم أسلوب جمع البيانات في هذا البحث التقنيات التوثيقية والمراجعة والمنهج التاريخي والفلسفي ومراجعة البيانات أو الوثائق. في حين أن أسلوب تحليل البيانات المستخدم في هذا البحث هو الأسلوب الوصفي التحليلي. ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال التثليث والمصادقية.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) إن حكم سببويه العدة الوارد في تعميم المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 بشأن الزواج أثناء فترة العدة، والذي يهدف إلى أن يكون بمثابة تعليمات في تنفيذ تسجيل الزواج للزوج السابق الذي سيتزوج امرأة أخرى أثناء فترة عدة زوجته السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف

التعميم إلى توفير اليقين في الإجراءات والإجراءات المتعلقة بتسجيل هذه الزيجات. وبموجب الأحكام الواردة في التعميم، يمكن للرجل الذي يريد تسجيل الزواج أن يفعل ذلك إذا كان قد طلق رسمياً. ويجب إثبات ذلك بشهادة طلاق. ثم يمكن للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إذا انقضت عدة زوجته، والرجل الذي تزوج مرة أخرى ويريد إعادة زوجته لا يمكنه ذلك إلا إذا حصل على تصريح بتعدد الزوجات من المحكمة. لذلك فإن مفهوم سبويه العدة هو شيء يشبه العدة. وهكذا، يجب على الرجل أن يؤدي سبويه العدة نتيجة فسخ النكاح كما تفعل المرأة في عدتها (العدة). (2) إن حكم سبويه العدة الذي نظمته الرسالة التعميمية لمدير عام الإرشاد الإسلامي بشأن الزواج في فترة العدة من منظور النظرية القانونية النسوية التعميمية القائمة على المساواة والعدالة، وخاصة بالنسبة للمرأة أن الأحكام الواردة في الرسالة التعميمية هي شكل من أشكال الحماية للمرأة ويمكن أن يستخدمها الرجل كجهد لإعادة التفكير عند رغبته في الزواج بامرأة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمنع إمكانية تعدد الزوجات الخفي الذي يرتكبه الرجال، والذي يمكن أن يكون ضاراً بالمرأة. لذا فإن تشريع العدة الوارد في التعميم قد حقق وأوجد المساواة والعدل بين الرجل والمرأة اللذين يجب عليهما القيام بالعدة.